

ANALISIS POTENSI SEKTOR UNGGULAN KOTA BALIKPAPAN DALAM MEMPERSIAPKAN IBU KOTA BARU DARI PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN

Nurmaya Yulianti¹, Rizki Firmansyah², Sri Sundari³
mayaharjito@gmail.com¹, firman87@gmail.com², sri.sundari@idu.ac.id³
Universitas Pertahanan, Jakarta ¹²³

Abstract

This study aims to determine the leading economic sectors of the Balikpapan City in preparing for the New Capital City of Indonesia. This phenomenon is related to the management of leading sectors in the concept of article defense economy. Where the utilization of leading economic sectors are part of national resources as an effort to improve the standard of living of the people can improve welfare, create security stability and strengthen national defense. This study uses secondary data in the form of Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Balikpapan City and East Kalimantan Province in 2016-2018. This research uses a quantitative approach to analyze the data collected. The analytical tools: 1). Location Quotient (LQ) analysis can be used to determine the basis and non-base sectors in the economy of Balikpapan City. 2). Shift Share Analysis is used to determine changes and shifts in the economic structure of the City of Balikpapan. The results of the analysis of 17 sectors based on the two analysis tools show that the leading and potential sectors in the City of Balikpapan are the transportation and warehousing sector; processing industry; information and communication.

Keywords: *leading sector, defense economy, Location Quotient, Shift Share*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan perekonomian Kota Balikpapan dalam mempersiapkan Ibu Kota Baru. Fenomena ini terkait dengan pengelolaan sektor unggulan dalam konsep ekonomi pertahanan. Dimana pemanfaatan sektor unggulan perekonomian yang merupakan bagian dari sumber daya nasional sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan, menciptakan stabilitas keamanan serta memperkuat pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data yang terkumpul. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1). Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kota Balikpapan. 2). Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran struktur perekonomian Kota

Balikpapan. Hasil analisis dari 17 sektor berdasarkan kedua alat analisis menunjukkan bahwa sektor unggulan dan potensial di Kota Balikpapan yaitu sektor transportasi dan pergudangan; industri pengolahan; informasi dan komunikasi.

Kata kunci: sektor unggulan, ekonomi pertahanan, *Location Quotient*, *Shift Share*.

Pendahuluan

Pertahanan secara umum mengandung makna mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara diartikan sebagai upaya untuk membangun, menggunakan dan membina kekuatan negara dalam rangka menanggulangi ancaman dari dalam dan luar negeri untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah suatu negara, dan keselamatan bangsa.

Sedangkan pertahanan negara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002).

Penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan negara bagi bangsa Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta, tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka kepentingan nasional.

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategi dan persepsi potensi ancaman yang dihadapi Indonesia, maka diperlukan penyesuaian antara kebijakan pembangunan dengan strategi pertahanan yang berkaitan dengan upaya-upaya memperkuat pengamanan dan jalinan kerjasama internasional diberbagai bidang. Muhamad Fadhil Nurdin (Purnomo Yusgiantoro : 2014, hal. 7) menjelaskan bahwa konsepsi keamanan nasional (*national security*) memiliki tiga unsur utama yaitu kedaulatan negara, integritas bangsa, serta keamanan dan pengamanan pembangunan nasional. Tiga hal tersebut yang menjadi perhatian dalam menentukan kebijakan pembangunan ibu kota baru.

Jakarta telah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan sejak lama, bahkan saat masa penjajahan Belanda, Jakarta yang dahulu dikenal dengan nama Batavia merupakan ibu kota dari Negara Hindia Belanda. Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka. Menurut sejarah, ibu kota Indonesia pernah berpindah ke Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Hal yang mendasari pemindahan ibu kota tersebut karena

konflik dan kondisi saat itu memaksa Ibu kota untuk pindah. Namun setelah konflik mereda, ibu kota kembali ke Jakarta.

Kondisi Jakarta semakin hari semakin tidak layak untuk tetap menjadi Ibu Kota. Jakarta merupakan kota yang sangat padat dengan permasalahan yang kompleks. Mulai dari permasalahan kependudukan hingga permasalahan lain yang berkaitan seperti terbatasnya lahan untuk pemukiman, sistem transportasi yang buruk sehingga menyebabkan kemacetan akut di Jakarta. Belum lagi permasalahan lingkungan seperti banjir, polusi yang mencemari air dan udara sehingga mengancam ketersediaan air bersih, dan udara yang kurang layak. Fenomena inilah yang menyebabkan Jakarta dinilai sudah tidak layak lagi menjadi ibukota negara.

Sehingga adanya keputusan mengenai pemindahan lokasi ibukota diharapkan mampu untuk mengurangi permasalahan yang kompleks di Jakarta juga mampu membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mengakselerasi pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan, kesejahteraan masyarakat antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Kalimantan Timur telah ditetapkan menjadi daerah Ibu Kota baru Indonesia. Pemerintah belum menyebutkan secara rinci daerah yang akan dibangun menjadi pusat pemerintahan. Dari studi yang telah dilakukan oleh Bappenas, Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah yang berpotensi untuk dijadikan pusat pemerintahan.

Dalam menghadapi rencana pemindahan ibu kota tersebut, Kota Balikpapan sebagai salah satu wilayah yang akan dibangun pusat pemerintahan ibu kota, perlu mempersiapkan diri agar dapat pemindahan ibu kota dapat berdampak baik terhadap kota Balikpapan atau bahkan kota Balikpapan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap ibu kota baru tersebut. Melihat kondisi Jakarta saat ini, agar kota Balikpapan tidak kalah bersaing dengan kegiatan ekonomi dari daerah lain, perlunya pengembangan ekonomi lokal berbasis pada keunggulan wilayah. Hal ini menjadi penting agar potensi lokal daerah dapat diakomodir dalam pembangunan pusat pemerintahan sehingga dampak ekonomi dari pengembangan pusat pemerintahan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.

Mengetahui lebih jauh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dan peluang pengembangannya adalah suatu yang sangat mendasar dalam proses perencanaan pembangunan. Tanpa hal tersebut, maka perencanaan pembangunan akan berjalan tanpa prioritas. Impikasinya kemudian adalah pembangunan akan berjalan secara stagnan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengetahui sektor mana yang menjadi prioritas dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai basis ekonomi berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (provinsi/

kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukan sektor unggulan (*leading sector*) di suatu daerah/wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk mengetahui kemampuan dibidang ekonomi di kota Balikpapan melalui analisis pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan pendekatan basis ekonomi, guna mengidentifikasi sektor-sektor mana yang paling unggul dan strategis untuk dikembangkan.

Dengan mengembangkan perekonomian berbasis sektor unggulan, pemerintah akan membentuk ekonomi daerah yang kuat sebagai pertahanan nirmiliter. Supandi (2019, 126) menyebutkan fenomena tersebut berkaitan dengan pengelolaan potensi dan pemanfaatan sumber daya nasional (Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana) untuk kepentingan pertahanan negara dalam upaya mewujudkan kemakmuran ekonomi rakyat dan keamanan nasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor unggulan dan mengetahui share sektor di kota Balikpapan terhadap sektor yang sama di Kalimantan Timur, sehingga dapat memberikan gambaran sektor unggulan yang layak di kembangkan di Kota Balikpapan dengan berbasis pada potensi ekonomi lokal dan rekomendasi dalam pengembangannya dalam rangka kepindahan ibukota baru dengan cara menganalisis pertumbuhan sektoral Kota Balikpapan.

Kajian Pustaka

Ekonomi secara umum adalah kegiatan mengalokasikan, memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi barang dan jasa yang diperlukan, baik oleh seseorang, sekelompok orang, masyarakat maupun negara. Ekonomi Pertahanan merupakan cabang ilmu yang menerapkan ilmu ekonomi pada masalah pertahanan negara (Yusgiantoro, 2014). Ekonomi pertahanan mencari cara terbaik dari alokasi berbagai sumber daya nasional guna memenuhi kebutuhan akan rasa aman dari ancaman. Dalam perkembangannya, ancaman terhadap suatu negara tidak hanya berasal dari luar negeri, namun juga dari dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Sumber Daya Nasional (SDN) adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dalam pertahanan negara, pengelolaan sumber daya nasional bertujuan untuk mentransformasikan SDN beserta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Pengelolaan SDN dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman.

Sektor unggulan merupakan derivasi dari sebuah postulat yang dikembangkan dalam kajian perdagangan internasional, di mana suatu negara harus memiliki sebuah keunggulan. Selanjutnya kata keunggulan tersebut mewarnai wacana perdagangan dalam negeri, dan implikasinya di masing-masing negara yang masuk dalam perdagangan internasional mengembangkan ekonominya berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki. Postulat

dari *comparative advantage* adalah bahwa jika sebuah bangsa ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam perdagangan internasional, maka perlu adanya keunggulan *comparative absolute* yang dimiliki suatu bangsa atau negara (Dominick Salvatore, 1996).

Kriteria komoditas unggulan menurut Ambardi dan Socia (2002) salah satunya adalah bahwa komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran. Lalu bagaimana mengembangkan suatu wilayah menggunakan basis komoditas unggulan adalah ketika komoditas tersebut mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian. Dengan kata lain, komoditas unggulan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan dan pengeluaran.

Manfaat mengetahui sektor unggulan, mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi ekonomi dengan cara mengukur variabel yang terkait berdasarkan PDRB sektoral untuk mengungkap kecenderungan dan membuktikan secara sistematis sederhana berbagai data yang bersifat kuantitatif. Hasil identifikasi dan analisis berupa penentuan sektor ekonomi unggulan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dapat menjadi bahan masukan atau saran dalam pengembangan potensi ekonomi regional Kota Balikpapan.

Untuk menjawab permasalahan digunakan metode analisis data *Location Quotient* untuk menentukan sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kota Balikpapan dan analisis *Shift Share* untuk mengetahui perubahan pergeseran sektor wilayah Kota Balikpapan.

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan sebagai langkah awal untuk memahami sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah yang menjadi sektor basis atau leading sektor. Teknik ini menyajikan perbandingan antara kemampuan suatu sektor di daerah yang dianalisa dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran dalam menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat

berupa jumlah tenaga kerja per-sektor ekonomi, jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria.

$$LQ = \frac{S_i/N_i}{S/N} = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Dimana:

S_i = Jumlah PDRB sektor ekonomi di daerah yang dianalisa

S = Jumlah PDRB seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang dianalisa

N_i = Jumlah sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas, dimana daerah yang dianalisa menjadi bagiannya

N = Jumlah seluruh PDRB di daerah acuan yang lebih luas

Dari perhitungan LQ suatu sektor, kriteria umum yang dihasilkan adalah:

- Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat wilayah acuan
- Jika $LQ < 1$, disebut sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada tingkat wilayah acuan
- Jika $LQ = 1$, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan

Analisis Shift-Share

Analisis *shift-share* merupakan salah satu model yang memiliki kelebihan dalam melihat pola pertumbuhan daerah dan besarnya angka pertumbuhan yang seharusnya dapat dicapai atau terjadi. Potensi pertumbuhan ekonomi sektoral dapat dianalisis dengan menggunakan metode dekomposisi analisa *shift-share*, dimana pertumbuhan merupakan fungsi identitas dari *regional share* (R), *proportional shift* (Sp) dan *differential shift* (Sd). Menurut Glasson (1990) dua komponen *shift* (Sp dan Sd) memisahkan unsur pembentukan regional yang bersifat ekstern dan intern.

Analisis *shift-share* merupakan salah satu model yang memiliki kelebihan dalam melihat pola pertumbuhan daerah dan besarnya angka pertumbuhan yang seharusnya dapat dicapai atau terjadi. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang saling berhubungan.

Tiga bidang tersebut meliputi: Pertama, pertumbuhan ekonomi daerah (*regional share*) diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral kemudian dibuat perbandingan dengan sektor perekonomian yang sama sebagai acuan, sehingga diketahui perubahan-perubahan dan perbandingannya. Kedua, pergeseran proporsional (*proportional shift*) untuk mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah yang dianalisa dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan acuan. Ketiga, pergeseran diferensial (*differential*

shift) untuk membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan.

$$\text{Regional share} = [y_i ((Y^t/Y^0) - 1)]$$

$$\text{Proportional Shift} = [y_i ((Y_i^t/ Y_i^0) - (Y_t - Y^0))]$$

$$\text{Differential Shift} = [y_i ((y_i/y_i^0) - (Y_i^t/Y_i^0))]$$

Dimana:

y_i : output sektor ekonomi daerah

y_i^0 : output sektor ekonomi daerah tahun awal

y_i^t : output sektor ekonomi daerah tahun t

Y^t : output sektor nasional tahun t

Y^0 : output nasional tahun awal

Y_i^0 : output sektor I nasional tahun awal

Y_i^t : output sektor I nasional tahun t

Analisis Potensi Ekonomi Kota Balikpapan

PDRB Kota Balikpapan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kenaikan nilai PDRB yang terbentuk pada tahun X dibandingkan dengan nilai PDRB terbentuk pada tahun X-1. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan terus meningkat. Pada tahun 2016 PDRB Kota Balikpapan sebesar Rp. 73.221.462 juta. Pada tahun 2017, PDRB Kota Balikpapan tumbuh sebesar 3,81 persen, menjadi sebesar Rp. 76.010.336,50 juta. PDRB Kota Balikpapan kemudian meningkat menjadi Rp. 79.786.081,70 juta di tahun 2018 atau tumbuh sebesar 4,97 persen.

Di sisi lain, PDRB Kalimantan Timur selama periode 2016-2018 mengalami pertumbuhan lebih besar jika dibandingkan dengan PDRB Kota Balikpapan. Pada tahun 2017, PDRB Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 21,74 persen sementara pada tahun yang sama PDRB Kota Balikpapan hanya tumbuh sebesar 3,81 persen. Tahun berikutnya, PDRB Provinsi Kalimantan Timur tetap tumbuh namun dengan persentase yang lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni hanya sebesar 3,13 persen, pada tahun yang sama, PDRB Kota Balikpapan tumbuh lebih besar yaitu 4,97 persen. Perbandingan PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 : PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Kota Balikpapan		Provinsi Kalimantan Timur	
	PDRB	pertumbuhan	PDRB	pertumbuhan
	(dalam juta)	(dalam %)	(dalam juta)	(dalam %)
2016	73.221.462,00		360.676.360,00	
2017	76.010.336,50	3,81	439.087.630,00	21,74
2018	79.786.081,70	4,97	452.846.490,00	3,1

Sumber: Data BPS, diolah oleh peneliti 2020

Perbandingan Regional

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 daerah kabupaten/kota. Kota Balikpapan memberikan sumbangsih yang besar terhadap PDRB Kalimantan Timur secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016 sebesar 20,30 persen PDRB Provinsi Kalimantan Timur merupakan kontribusi dari PDRB Kota Balikpapan. Kontribusi Kota Balikpapan terhadap PDRB Kalimantan Timur menurun pada tahun 2017 menjadi 17,31 persen. Sedangkan pada tahun 2018, Kota Balikpapan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kalimantan Timur sebesar 17,62 persen. Tabel 2 di bawah ini memuat persentase PDRB Kota Balikpapan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. Persentase PDRB Kota Balikpapan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	PDRB Provinsi Kalimantan Timur	PDRB Kota Balikpapan	% Balikpapan terhadap KalTim
	(dalam juta)	(dalam juta)	
2016	360.676.360,00	73.221.462,00	20,30%
2017	439.087.630,00	76.010.336,50	17,31%
2018	452.846.490,00	79.786.081,70	17,62%

Sumber: Data BPS, diolah oleh peneliti 2020

Analisis Sektor Basis (*Location Quotient*)

Salah satu metode untuk menentukan sektor basis ekonomi di suatu daerah adalah metode *Location Quotient (LQ)*. Pada proses perhitungannya, analisis *LQ* menggunakan perbandingan antara kondisi perekonomian suatu wilayah dengan acuan perekonomian wilayah yang lebih besar.

Tabel 3 : Perhitungan *LQ* Kota Balikpapan Tahun 2018

No.	Sektor Ekonomi	LQ
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,137458

2	Pertambangan dan Penggalian	0,000937
3	Industri Pengolahan	2,645053
4	Pengadaan Listrik dan gas	1,630008
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1,43779
6	Konstruksi	1,739404
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,584598
8	Transportasi dan Pergudangan	2,688224
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,859617
10	Informasi dan Komunikasi	2,238808
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,19947
12	Real Estat	1,946077
13	Jasa Perusahaan	1,367057
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial Wajib	0,695244
15	Jasa Pendidikan	0,947276
16	Jasa Kesehatan	0,931995
17	Jasa Lainnya	1,263022

Pada analisis *LQ*, Kota Balikpapan dianalisis dengan konteks Kota Balikpapan sebagai bagian dari perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Suatu sektor dinyatakan sebagai sektor unggulan ditunjukkan oleh nilai *LQ* yang besarnya lebih dari 1. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa sektor-sektor perekonomian yang menjadi sektor basis (sektor yang mampu memenuhi kebutuhan domestik sendiri dan juga mampu menyediakan untuk daerah lain). Sedangkan suatu sektor yang memiliki nilai *LQ* kurang dari 1 menunjukkan bahwa sektor-sektor yang tidak mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar daerahnya sendiri, bahkan harus mengimpor dari luar daerah yang bersangkutan.

Dari hasil analisis *LQ* diketahui sektor unggulan di Kota Balikpapan pada tahun 2018 adalah sektor Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, Pengadaan Listrik dan gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan Jasa Perusahaan. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar daerahnya sendiri, bahkan dapat mengekspor ke luar daerah.

Sektor yang bukan termasuk dalam sektor basis di Kota Balikpapan adalah jasa pendidikan, jasa kesehatan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial

Wajib, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian karena memiliki nilai *LQ* kurang dari satu. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang tidak mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar daerahnya sendiri, bahkan harus mengimpor dari luar daerah yang bersangkutan.

Analisis *Shift Share*

Seperti dalam analisis *LQ*, analisis *shift-share* Kota Balikpapan dilakukan dengan membandingkannya terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Analisis *shift-share* dilakukan dengan menggunakan data dua titik tahun, yaitu tahun 2017 dan tahun 2018.

Tabel 4 : Perhitungan analisis *shift share* Kota Balikpapan Tahun 2018

	Lapangan Usaha	R	Sp	Sd	G
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.900,05	18.175,14	9.029,70	48.104,90
2	Pertambangan dan Penggalian	1.075,83	(649,22)	(159,61)	267,00
3	Industri Pengolahan	1.323.726,09	180.255,75	307.612,97	1.811.594,80
4	Pengadaan Listrik dan gas	2.016,93	2.460,42	(2.084,15)	2.393,20
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1.666,99	3.279,06	(3.859,95)	1.086,10
6	Konstruksi	280.749,82	393.755,42	(124.318,84)	550.186,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	187.864,85	214.178,38	(7.972,83)	394.070,40
8	Transportasi dan Pergudangan	182.333,08	240.508,07	(118.356,35)	304.484,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33.793,38	67.778,85	29.684,47	131.256,70
10	Informasi dan Komunikasi	80.681,47	149.799,81	(94.565,28)	135.916,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	73.196,92	(87.937,35)	146.820,53	132.080,10
12	Real Estat	40.318,43	3.934,88	16.874,99	61.128,30
13	Jasa Perusahaan	6.058,79	965,99	31,52	7.056,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial Wajib	27.295,62	(29.356,91)	65.360,20	63.298,90
15	Jasa Pendidikan	30.555,07	45.939,61	(10.161,48)	66.333,20
16	Jasa Kesehatan	11.746,00	15.838,66	(3.310,47)	24.274,20
17	Jasa Lainnya	15.006,83	24.270,49	2.936,57	42.213,90
Jumlah Total		279.550,95	-	(6.833,55)	272.717,41
Growth : G		272.717,41			
Regional Share: R		279.550,95			
Shift: S		(6.833,55)			

Sumber: Data BPS, diolah oleh peneliti 2020

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi ($Growth=G$) Kota Balikpapan adalah sebesar Rp. 272.717,41 juta sejak tahun 2017 hingga 2018. Perubahan tersebut secara umum memiliki persentase yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dalam periode yang sama. Apabila Kota Balikpapan tumbuh seperti Provinsi Kalimantan Timur maka *regional share* (R) Kota Balikpapan adalah sebesar Rp. 279.550,95 juta. Sedangkan *total shift* (S) adalah negatif, yakni Rp. 6.833,55 juta. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan rata-rata sektor di Kota Balikpapan lebih lambat dari pertumbuhan rata-rata sektor di Provinsi Kalimantan Timur.

Nilai *proportional shift* (Sp) menunjukkan bahwa daerah yang lebih rendah (kota) memberikan kontribusi untuk sektor-sektor yang sama di daerah yang lebih tinggi (provinsi). Nilai Sp semakin rendah berarti semakin sedikit kontribusi untuk sektor-sektor yang sama di daerah yang lebih tinggi (provinsi), dan sebaliknya. Pada Kota Balikpapan, sektor yang memiliki nilai Sp positif yaitu memberikan kontribusi besar untuk sektor-sektor yang sama di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Pendidikan, Jasa Lainnya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Jasa Kesehatan, Real Estat, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Pengadaan Listrik dan gas, Jasa Perusahaan.

Sementara itu, sektor di Kota Balikpapan yang memiliki nilai Sp negatif yaitu memberikan kontribusi kecil untuk sektor-sektor yang sama di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial Wajib, serta Pertambangan dan Penggalian.

Secara keseluruhan, Nilai *proportional shift* (Sp) sebesar Rp. 0 juta, artinya menunjukkan bahwa Kota Balikpapan menyumbangkan distribusi yang kecil untuk sektor-sektor yang tumbuh secara cepat di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Dapat dikatakan bahwa strategi pembangunan Kota Balikpapan berbeda dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain, komposisi sektor yang diandalkan oleh Kota Balikpapan berbeda dengan komposisi sektor yang diandalkan oleh Provinsi Kalimantan Timur secara umum.

Nilai *differential shift* (Sd) yang negatif berarti bahwa sektor-sektor di daerah yang lebih rendah (kota) secara umum tidak mengalami kemajuan dibandingkan dengan daerah yang lebih tinggi (Provinsi) dan sebaliknya. Sektor-sektor di Kota Balikpapan yang tidak mampu mengungguli daerah lain dalam peranannya terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur adalah Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan gas, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan. Secara umum nilai Sd Kota Balikpapan sebesar minus Rp 6.833,55 juta menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kota

Balikpapan secara umum tidak mengalami kemajuan dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu, sektor yang memiliki nilai S_d positif adalah sektor-sektor yang mampu mengungguli sektor lain dalam peranannya terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial Wajib, serta sektor Jasa Lainnya.

Penutup

Kesimpulan

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi ($Growth=G$) Kota Balikpapan adalah sebesar Rp. 272.717,41 juta sejak tahun 2017 hingga 2018. Apabila Kota Balikpapan tumbuh seperti Provinsi Kalimantan Timur maka *regional share* (R) Kota Balikpapan adalah sebesar Rp. 279.550,95 juta. Sedangkan *total shift* (S) adalah negatif, yakni Rp. 6.833,55 juta. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan rata-rata sektor di Kota Balikpapan lebih lambat dari pertumbuhan rata-rata sektor di Provinsi Kalimantan Timur

Nilai *proportional shift* (Sp) sebesar Rp. 0 juta, artinya menunjukkan bahwa Kota Balikpapan menyumbangkan distribusi yang kecil untuk sektor-sektor yang tumbuh secara cepat di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Dapat dikatakan bahwa strategi pembangunan Kota Balikpapan berbeda dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain, komposisi sektor yang diandalkan oleh Kota Balikpapan berbeda dengan komposisi sektor yang diandalkan oleh Provinsi Kalimantan Timur secara umum.

Secara umum nilai *differential shift* (Sd) Kota Balikpapan sebesar minus Rp 6.833,55 juta menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kota Balikpapan secara umum tidak mengalami kemajuan dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Pertahanan ekonomi yang kuat dari suatu negara salah satu indikatornya dapat terlihat dari sumber daya lokal yang digunakan. Dalam mendukung pemindahan ibu kota yang memperhatikan pertahanan ekonomi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Balikpapan hendaknya mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki potensi lokal. Pengembangan sektor tersebut dapat memberikan efek pengganda dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan terangkat. Pengembangan potensi ekonomi lokal merupakan upaya untuk membangun pertahanan ekonomi yang kuat. Sebagai ibu kota negara, sudah selayaknya menjadi *role model* dalam membangun pertahanan ekonomi agar dapat ditiru oleh kota lain yang ada di Indonesia.

Rekomendasi

Dalam mempersiapkan ibukota baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam mengembangkan sektor ekonomi lokal yaitu:

- Dari hasil analisis *location quotient (LQ)* pada tahun 2017 dan 2018, sektor unggulan yang layak untuk dikembangkan adalah sektor Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, Pengadaan Listrik dan gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan Jasa Perusahaan.
- Dari hasil analisis differential shift (Sd) pada tahun 2017 dan 2018, sektor Industri Pengolahan memiliki nilai 307.612,97, yang berarti sektor Industri Pengolahan di Kota Balikpapan berarti sektor tersebut mampu mengungguli sektor lain dalam peranannya terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

- Ambardi, U.M. dan Socia, P. 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Pusat Pengkajian kebijakan Pengembangan Wilayah, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. Kota Balikpapan dalam angka tahun 2016-2018. BPS Kota Balikpapan.
- Badan Pusat Statistik. Provinsi Kalimantan Timur dalam angka tahun 2016-2018. BPS Propinsi Kalimantan Timur.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- Salvator. Dominick. 1996. *Principles of Economic*, Second Edition.
- Supandi. 2019. *Text Book Ekonomi Pertahanan 13 Wawasan Studi Ilmu Ekonomi Pertahanan*. CV. Makmur Cahaya Ilmu, Jakarta.
- Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi Pertahanan Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.